



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI
KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN
(II),
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

JUMAT, 6 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bandaro Bani Adlan, Azriel Rafi Raditya, Naufal Nazihih, dan Alexander Muhammad Naabil

PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan (II), Perbaiki Permohonan (II)

Jumat, 6 Februari 2026, Pukul 09.07 – 09.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Alifah Rahmawati
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 15/PUU-XXIV/2026:**

Alexander Muhammad Naabil

B. Pemohon Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026:

1. E'eng Wicaksono
2. Suardi Soamole

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026:

1. Ahmad Zulfikar
2. Khaerul Bahran
3. Wiranto Embong Bulan
4. Salim Wehfany

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.07 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:27]**

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara untuk Nomor 15/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 15?

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [00:53]

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Alexander Muhammad Naabil selaku Pemohon III daripada Perkara 15 Tahun 2026. Terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Ya, baik.
Kemudian, Nomor 18, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11]

Walaikum salam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [01:12]

Saya Ahmad Zulfikar. Kemudian, yang hadir ada rekan kami Khaerul Bahran, Wiranto Embong Bulan, Salim Wehfany. Dan ada Prinsipal, Yang Mulia, Pemohon I dan Pemohon II atas nama E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Ya, baik. Ini saya terlebih dahulu ke Perkara Nomor 15, ya. Nomor 15 ini ada surat yang kami terima perihal penarikan kembali Permohonan PUU Nomor 15/2026, ya?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:45]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Apakah betul itu?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:46]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:47]

Betul. Ini yang menarik semuanya, tiga-tiganya?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:50]

Ketiganya, betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Ketiga-tiganya sudah tanda tangan semua, ya?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:53]

Sudah.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]

Begitu, ya?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026:
ALEXANDER NAABIL [01:55]**

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]

Jadi, persidangan ini Saudara dipanggil untuk menya ... kita untuk konfirmasi terkait dengan penarikan tersebut?

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026:
ALEXANDER NAABIL [02:00]**

Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:00]

Ya, betul, ya?

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026:
ALEXANDER NAABIL [02:01]**

Betul.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Betul, baik. Saudara tunggu sebentar, ini kami akan mendengarkan pokok-pokok dari Perbaikan Permohonan Nomor 18. Silakan, untuk 18!

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 15/PUU-XXIV/2026:
ALEXANDER NAABIL [02:11]**

Baik, terima kasih.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-
XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:13]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
Adapun yang menjadi perbaikan kami, Yang Mulia (...)

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:25]

Pokok-pokoknya saja, ya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:25]

Baik, Yang Mulia. Poin besarnya itu terkait dengan Legal Standing (...)

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:30]

Frasa dengan Petitem, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:31]

Sudah ada buktinya soal Legal Standing-nya? Sudah dilengkapi dengan bukti-bukti?

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:37]

Sudah, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:38]

Sudah?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:38]

Sudah kami masukkan yang terkait dengan tambahan daftar bukti surat, Yang Mulia.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:44]

Baik.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:46]

Kemudian, adapun yang menjadi pokok-pokoknya, yakni pada halaman 4, itu Kedudukan Hukum Pemohon, Poin 10, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]

Ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:03]

Kemarin kami menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk Tahun 2021, Yang Mulia.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:07]

Oh, yang 7/2025 sekarang?

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:09]

Sekarang (...)

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Ya.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:11]

Sudah 2025, Yang Mulia.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:12]

Ya. Lanjut, apa lagi?

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:13]

Kemudian, di halaman 5, pada poin 12, Yang Mulia.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:17]

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:17]

Yaitu terkait dengan Legal Standing, Yang Mulia. Kami melakukan pendalaman dan mempertajam dari hasil kajian kami, Yang Mulia (...)

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:26]

Ya.

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:26]

Atas kerugiannya, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:29]

Itu Legal Standing-nya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:30]

Baik, Yang Mulia.

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:30]

Di bagian Posita, apa perbaikannya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [03:40]

Kemudian ... kemudian, di pada halaman 7, Yang Mulia, poin 13 frasa, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]

Itu halaman 7 nya masih Legal Standing?

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:19]

Ya, Yang Mulia. Kelewat tadi.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:20]

Yang di Posita? Legal Standing masih ada lagi perbaikan selain itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:23]

Masih ada, Yang Mulia. Poin 13 frasa.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:27]

He eh, kemudian?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:28]

Poin 14, Yang Mulia, ada perbaikan.
Poin 15 (...)

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]

Ada perbaikan juga?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:34]

Baik, Yang Mulia. Poin 16, Poin 17, Poin 18.
Kemudian, pada Pokok-Pokok Permohonannya, yakni di Posita, pada poin 20, Yang Mulia.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:46]

20 diperbaiki?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:48]

Diperbaiki, Yang Mulia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:49]

Ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:50]

Pada poin 23, Yang Mulia.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:53]

Poin 23 perbaikannya.

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:57]

Kemudian, pada poin 33, Yang Mulia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:00]

Poin 33.

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:03]

Kemudian, pada poin 37.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:06]

Ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:08]

Pada poin 39.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:15]

Ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:16]

Kemudian (...)

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:18]

40 tidak, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:23]

Pada poin 50, Yang Mulia.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:25]

50, oh, langsung 50. Poin 50-nya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:31]

Dan 51, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:33]

51, oke. Oh, ini sudah bagian akhir, ya.

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:39]

Kemudian, masuk pada Petitum, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:42]

Petitum juga ada perbaikan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:44]

Baik, Yang Mulia.

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:42]

Silakan dibaca lengkap kalau Petitum, ya!

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [05:46]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa Permohonan ini dengan putusan yang Amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *berusia paling rendah 40 tahun*, frasa *berusia paling rendah 35 tahun*, frasa *berusia paling rendah 30 tahun* sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mensyaratkan adanya batasan ... batas usia minimum' dan harus dimaknai bahwa pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota KPU, telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun setingkat untuk calon anggota KPU Provinsi, telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun setingkat untuk calon anggota KPU kabupaten/kota'.
3. Menyatakan frasa *berusia paling rendah 40 tahun*, frasa *berusia paling rendah 35 tahun*, frasa *berusia paling rendah 30 tahun*, dan *berusia paling rendah 21 tahun*, Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mensyaratkan adanya batasan usia minimum' dan harus dimaknai bahwa 'pada saat pendaftaran telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun dan/atau pernah menjabat sebagai penyelenggara pemilu untuk calon anggota Bawaslu, telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun setingkat untuk calon anggota Bawaslu provinsi, telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan 5 tahun setingkat untuk calon anggota bawaslu kabupaten/kota, dan telah memiliki sekurang-kurangnya pengalaman kepemiluan untuk calon anggota panwaslu kecamatan, calon anggota panwaslu kelurahan desa, dan pengawas TPS'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:29]

Baik, terima kasih. Ini maksudnya Saudara ini dalam petitem ini meminta untuk tidak ada lagi usia kan berarti, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [09:40]

Baik, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:42]

Jadi, ini terkait dengan pengalaman pemilu setingkat. Setingkat itu maksudnya setingkat kalau di tingkat nasional itu KPU itu ya, maksud Anda punya pengalaman setingkat di tingkat nasional itu maksudnya begitu, setingkatnya itu?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [09:54]

Setingkat di bawahnya, Yang Mulia.

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:51]

Oh, setingkat di bawahnya maksudnya?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [09:55]

Ya, Yang Mulia.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:58]

Jadi, yang Saudara maksud di sini mempunyai pengalaman pemilu setingkat itu setingkat di bawah KPU maksudnya begitu?

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:03]

Ya, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:06]

Termasuk yang di provinsi setingkat itu setingkat di bawahnya juga begitu, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:06]

Baik, Yang Mulia.

90. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:11]

Oke, demikian juga dengan Bawaslu, ya? Maksud Saudara begitu ya?

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:15]

Baik, Yang Mulia.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]

Baik, ini terkait dengan permohonan Saudara ini Saudara menyampaikan bukti. Buktinya adalah P-1 sampai dengan P-19, betul?

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:31]

Betul, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:37]

Betul ya, sudah kami verifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik, terkait dengan permohonan ini termasuk yang melakukan penarikan Perkara Nomor 15 dan Nomor 18, ini nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Saudara menunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Jadi, bukan kami bertiga yang

akan memutus ya, kebetulan dari Perkara 18 baru pertama kali ya, mengajukan permohonan, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [11:00]

Pertama kali, Yang Mulia.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Pertama kali. Jadi, bukan kami bertiga yang akan memutus ya, tetapi akan dilaporkan terlebih dahulu ke Rapat Permusyawaratan Hakim.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [11:30]

Baik, Yang Mulia.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Jadi, nanti Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara atau perkara Saudara ya, gitu, ya.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [11:18]

Baik, Yang Mulia.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Jadi, Saudara nanti termasuk yang 15 juga kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

Baik, berkaitan dengan permohonan Saudara, ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Ada yang mau disampaikan lagi?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [11:31]

Cukup, Yang Mulia.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]

Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.18 WIB

Jakarta, 6 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

